

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy)**



K A R L I N A
NIM :10725000078

PROGRAM S 1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”**.

Latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah karena melihat selama ini realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Meranti tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dirumuskanlah rumusan masalah tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti, faktor penghambat belum optimalnya pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti sejumlah 16 orang Serta masyarakat Wajib Pajak jumlah 1025 orang karena populasi terlalu besar maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 51 orang responden dengan menggunakan *teknik random sampling*.

Subjek penelitian ini adalah para pemungut dan wajib pajak Kecamatan Teluk Meranti serta Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kantor Camat Teluk Meranti sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan di tinjau menurut ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder Setelah melaksanakan penelitian penulis berkesimpulan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti tidak terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi, kurang nya

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

Upaya dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Ditinjau menurut ekonomi Islam optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam hal ini karena penyaluran dana untuk pembangunan tidak terlaksana secara optimal jadi tidak adanya keseimbangan antara pembayaran pajak dengan pelaksanaan pembangunan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiimi

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam**”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Revolusioner Alam yakni Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi yang telah membawa perubahan total pada peradaban manusia sehingga menjadi lebih beradab.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sangat diharapkan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala, namun dengan keridhaan Allah dan do’a dari semua pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapinya.

Keberhasilan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada:

1. Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan do’anya mengharapkan keberhasilan kepada penulis yakni ayahanda

Jailani dan ibunda Gadariah (Alm) beserta kakanda Amril SH, kakanda Mardan, kakanda Jus'ar, dan Adinda Sarima Alfa Amami.

2. Kepada bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku rektor universitas Islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru
3. Bapak dekan Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd beserta pembantu dekan I, II dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
4. Bapak H. Erman M.Ag selaku penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan penulis dibidang akademik.
5. Bapak Mawardi S.Ag M.Si dan bapak Darmawan Tia Indra Jaya M.A selaku ketua dan wakil Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan dorongan dan bimbingan penulis.
6. Bapak Drs. H. Ahmad Darbi. B, MA Selaku pembimbing sehingga terselesainya tugas akhir ini.
7. Staf Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Segenap pimpinan Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Pelalawan dan seluruh Pemungut/kolektor Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam Lokal A angkatan 2007.
10. Kepada teman-teman serta adik-adik kost putri sepakat (Devi, Jana, Tina, Umi, Turi yati Juariah, Iin, Pina,) dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang selalu memberikan

motivasi, dan nasehat buat penulis dalam penyelesaian skripsi ini Terimakasih ya (Mazroi) serta my best friend Fitri Handayani. Yang selalu menemani penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan baik langsung ataupun tidak langsung, untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga.

Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Akhirnya penulis telah berusaha untuk mengerjakan skripsi ini sebaik mungkin, namun sebagai manusia biasa yang sangat dekat dari kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Wassalam

Pekanbaru, 09 November 2011

KARLINA
10725000078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografi dan Demografi	14
B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	16
C. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	19
D. Sosial Budaya.....	20

BAB III OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DALAM EKONOMI ISLAM

A. Optimalisasi

1. Pengertian optimalisasi.....23
2. Indikator-indikator Optimal.....23

B. Pajak dan masalahnya

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....24
2. Undang-undang Tentang Pajak.....27
3. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....29
4. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....30
5. Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....31
6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Sanksi Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam.....37
2. Karakteristik Ekonomi Islam.....42
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....43

BAB IV OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN TDITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak

- Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti 47

B. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pemungutan Pajak	
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti	56
C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap optimalisasi Pemungutan Pajak	
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Penerimaan PBB	3
Tabel II.2	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	15
Tabel IV.3	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	16
Tabel IV.4	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.	17
Tabel IV.5	Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan	17
Tabel IV.6	Komposisi Jumlah Penganut Agama	18
Tabel IV.7	Komposisi Jumlah Sarana Ibadah	19
Tabel IV.8	Komposisi Jenis Mata Pencarian	19
Tabel IV.9	Jawaban Responden Tentang Tingkat Kesadaran dalam Membayar PBB di Kecamatan Teluk Meranti.....	48
Tabel IV.10	Jawaban Responden Tentang Tingkat Kesadaran dalam Membayar PBB di Kecamatan Teluk Meranti.....	52
Tabel IV.11	Jawaban responden tentang penunggakan dalam pembayaran PBB di Kecamatan Teluk Meranti	53
Tabel IV.12	Jawaban responden tentang tingkat disiplin membayar PBB di Kecamatan Teluk Meranti.....	54
Tabel IV.13	Jawaban Responden Tentang Tingkat Keberatan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti.....	55

Tabel IV.14	Jawaban responden tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya.....	56
Tabel IV.15	Jawaban responden tentang tingkat pelayanan Penyerahan STTS di Kecamatan Teluk Meranti	57
Tabel IV.16	Jawaban responden tentang sifat para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti.....	58
Tabel IV.17	Jawaban responden tentang manfaat PBB bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini hendaknya harus lebih diarahkan pada ekonomi Indonesia yang mandiri. Kemandirian ini juga meliputi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan yang mandiri untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah atau PAD (diambil dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah) Dana perimbangan, pinjaman Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan serta biaya-biaya yang diperlukan itu, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itulah diatur dan ditetapkan mengenai pembiayaan untuk menjalankan rencana kerja pemerintah Daerah dan disisi lain menunjukan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Salah satu cara menutupi pengeluaran-pengeluaran itu adalah diperoleh dari sektor pajak. Dimana pajak merupakan bagian harta kekayaan rakyat yang

berdasarkan Undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara, serta bukan merupakan pinalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan serta sebagai instrument/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat¹. Hal ini dapat kita lihat dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara salah satu sumber penerimaan Negara yang menjadi tumpuan dan harapan untuk dapat direalisasikan diluar penerimaan minyak dan gas bumi.

Yang mana pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.²

Adapun asas pajak bumi dan bangunan:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.³

Dapat ditegaskan, pajak bumi dan bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya

¹ Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. Ke-1, h. 1

² Achmad Tjahjono & Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 345

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), h. 269

merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pajak bumi dan bangunan yang termasuk kedalam pajak Negara yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Pelalawan sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan secara hukum diatur dalam UU yang berlaku tersebut, maka iuran pajak wajib dikenakan atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak setiap daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah misalnya pengadaan jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa penerimaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel I.I
Laporan Penerimaan PBB
Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2009/2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	Rp.25.038.964	Rp. 8.071.872
2010	Rp.25.496.660	Rp. 8.824.801

Sumber: Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan

Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa target pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 25.538.964 dengan realisasinya sebesar Rp. 8.071.872 sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 25.496.660 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 8.328.890 Berdasarkan data tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran pajak di kecamatan teluk meranti belum terlaksana secara optimal. Ini terlihat dari target yang belum tercapai seratus persen yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yang menjadi penyebab masalah ini adalah mungkin karena perkembangan intelektual perpajakan dan moral atau kesadaran masyarakat yang masih rendah dan juga sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Sistem pemungutan pajak diindonesia yaitu memakai sistem "*Self Assesment Sistem*" serta melalui prosedur serta Undang-undang yang telah direvisi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penunggakan pembayaran setiap tahunnya oleh beberapa desa yang ada di kecamatan teluk meranti.

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan dibeberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, hampir semua negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu

sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya⁴

Adapun pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment.⁵

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.⁶

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, pajak merupakan kezaliman yang dibungkus dengan peraturan sehingga negara merasa berhak untuk mengambil harta yang sebenarnya bukan menjadi miliknya. Tidak mengherankan jika banyak orang menghindari pajak.

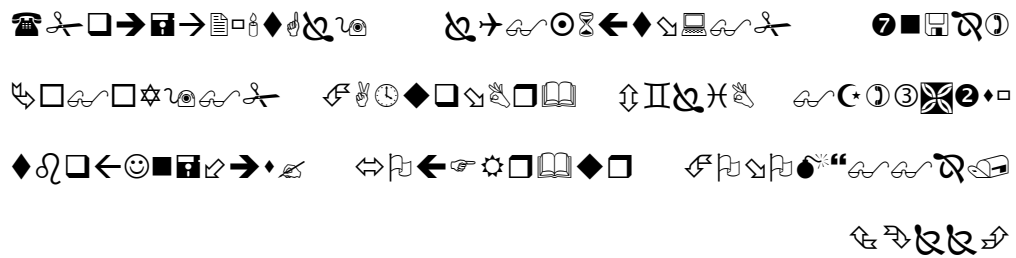
Islam telah melarang seluruh bentuk pungutan apapun nama dan alasannya. Pungutan yang diambil oleh negara dari rakyatnya harus memiliki landasan atau legislasi syar'i. Allah SWT Berfirman

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَتَّبِعُونَ ۖ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوا رَبَّهُمْ وَلَا يُفْقَهُوا رَبَّهُمْ ۚ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَتَّبِعُونَ ۖ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوا رَبَّهُمْ وَلَا يُفْقَهُوا رَبَّهُمْ ۚ﴾

⁴ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia* (Jakarta : 2002), h. 19

⁵ Sri putyamoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (yogyakarta: 2002), h. 2

⁶ Didin hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Insani: 2002), h. 61-63



Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah (2): 188)⁷

Di dalam Negara yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, pajak merupakan pos pendapatan utama. Sistem ekonomi kapitalis mengajarkan kepada kita kedzaliman yang tiada duanya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba menarik pajak dari rakyatnya. Rakyat seperti sapi perahan. Ada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Retribusi, dan sebagainya.

Selain itu, pajak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, harga barang meningkat karena di dalam mata rantai proses produksi setiap tahapanya dikenakan pajak. Pajak adalah kedzaliman yang dibungkus dengan peraturan sehingga Negara merasa berhak untuk mengambil harta yang sebenarnya

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 23

bukan menjadi miliknya. Tidak mengherankan jika banyak orang menghindari pajak.⁸ Peranan aparat pemerintah Daerah, khususnya para Camat dan Kepala Desa sangat penting dalam upaya mengoptimalkan dan menggerakkan wajib pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping hal tersebut peranan Camat diperlukan sekali untuk pengawasan alur penerimaan PBB dari wajib pajak sampai ketempat pembayaran.

Di kecamatan Teluk Meranti yang merupakan salah satu kecamatan yang ada Dikabupaten Pelalawan yang seperti Kecamatan lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya yang menjadi wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar PBB.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan semata-mata tugas dari pada pegawai kantor pajak saja tetapi melalui berbagai kerjasama aparat pemerintah daerah maupun pejabat yang terkait, dan tidak terlepas dari kerjasama dari masyarakat wajib pajak sendiri untuk membantu kelancaran penerimaan Pajak bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti. Dalam pajak bumi dan bangunan dimana penerimaannya belum mencapai target yang diinginkan.

Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Riau adalah suatu daerah yang juga berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dalam hal ini pajak bumi dan bangunan

⁸ <http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:3UIZiuuJBK0q7M:http://www.granitegrok.com/>

dimana dalam penerimaannya belum mencapai target yang diinginkan yang mana pendapatannya dari tahun ke tahun tidak stabil terus mengalami penurunan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau menurut Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada **“Bagaimana Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau menurut Ekonomi Islam”**.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti?
2. Apa-apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti?
3. Bagaimana Tinjauan ekonomi Islam terhadap optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti.
- b. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang ada berdasarkan praktek yang terjadi.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berminat dalam masalah perpajakan dan cara-cara yang paling baik untuk peningkatan penerimaannya
- c. Dapat dijadikan pedoman dan bisa menambah pengalaman penulis dalam mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah.
- d. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian lapangan.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah para pemungut dan wajib pajak Kecamatan Teluk Meranti serta Kantor Dinas pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kantor Camat Teluk Meranti.
- b. Objek penelitian ini adalah Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sejumlah 16 orang dan wajib pajak sejumlah 1025 orang karena populasi terlalu besar maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 5% dari wajib pajak yaitu 51 orang, sedangkan teknik yang digunakan adalah random sampling.

4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua macam:

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari responden di lapangan, yaitu pemungut pajak dan wajib pajak di Kecamatan Teluk Meranti .

2. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari kantor-kantor yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun kantor tersebut adalah Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kantor Kecamatan Teluk Meranti.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka sumber data penelitian ini berasal dari:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelian.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab.
- c. Angket yaitu teknik yang penulis lakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan menyediakan alternative jawaban untuk memperoleh data.

6. Metode analisa data

Metode yang digunakan penulis adalah metode yang disesuaikan dengan data diskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpul

kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi secara aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti.
- b. Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa sehingga dapat kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari : Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian yang meliputi letak geografis dan demografis,

sosial ekonomi masyarakat, kehidupan beragama dan pendidikan, adat istiadat dan sosial budaya.

BAB III : Optimalisasi Pemungutan dalam Ekonomi Islam

Bab ini membahas tentang Pengertian Optimalisasi, indikator-indikator Optimal, Pajak dan masalahnya yang meliputi: Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, undang-undang tentang pajak, Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Ekonomi Islam yang meliputi : pengertian ekonomi Islam, landasan ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, Prinsip-prinsip ekonomi Islam

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan ditinjau menurut ekonomi Islam yang berisi sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti?
2. Apa-apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti?

3. Bagaimana Tinjauan ekonomi Islam terhadap Optimalisasi
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Teluk Meranti?

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis, yang dengan adanya kesimpulan dan saran penelitian ini diharapkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografi dan Demografi

1. Letak Geografis

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari Kantor Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dimana Kecamatan Teluk Meranti adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Pelalawan. Yang terdiri dari Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kuala Kampar, Dimana Kecamatan Teluk Meranti ini Mempunyai Luas 424.600 Km² yang terdiri 1 Kelurahan yaitu: Kelurahan Teluk Meranti dan mempunyai 8 Desa yaitu: Desa Pulau Muda, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Gambut Mutiara, Desa Segamai, Desa Labuhan Bilik, Desa Teluk Binjai, Desa Petodaan. Wilayah Kecamatan Teluk Meranti Berbatasan Dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
- b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Kuala Kampar

- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan kerumutan

Sedangkan Secara Administratif Kecamatan Teluk Meranti terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 Desa 49 (RW), 112(RT), Lingkungan (2), Dusun (20). Jumlah penduduk 14.727 jiwa dan luas wilayah 424.600 Km². Sehingga tingkat kepadatan penduduk perkilo meternya adalah 5 jiwa/km².

Adapun ketinggian dari pemukiman laut 7.3 Meter dan banyaknya curah hujan 2.200 MM/ tahun. Jarak dari kota Kabupaten 25 km dan jarak dari ibu kota propinsi 60 km.¹

2. Demografis

Berdasarkan pendataan, Jumlah penduduk yang ada Dikecamatan Teluk Meranti pada tahun 2011 adalah 14.794 jiwa dengan kepala keluarga 3.705 KK untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 2
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	7.559 Jiwa
2	Perempuan	7.235 Jiwa
Jumlah		14.794 Jiwa

Sumber : Sumber : Kantor Camat Teluk Meranti Agustus 2010

¹ Data Monografi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2010

Dari tabel diatas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Kecamatan Teluk Meranti secara umum, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur/usia.

Tabel II. 3

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Umur	Jumlah
1	0-6 Tahun	830
2	7-12 Tahun	2677
3	13-18 Tahun	1529
4	19-24Tahun	1931
5	25-55Tahun	5306
6	56-79Tahun	2474
7	80 tahun keatas	47
Jumlah		14.794

Sumber : Kantor Camat Teluk Meranti 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk menurut usia yaitu 0-6 tahun berjumlah 830 jiwa, 7-12 tahun 2677 jiwa, 13-18 tahun berjumlah 1529, 19-24 tahun berjumlah 1931, 25-55 tahun 5306 jiwa, 56-79 tahun 2472 jiwa, 80 tahun keatas 47 jiwa.

B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Mengenai Pendidikan negara indonesia memberikan wewenang bagi semua warga indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan di eraglobalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan kearah pembentukan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Teluk Meranti perkembangan dari tahun ketahun. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 4
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	830
2	tidak tamat sekolah dasar	6051
3	tamat SD/ sederajat	5269
4	Tamat SLTP /sederajat	1837
5	Tamat SLTA / sederajat	468
6	tamat akademi/ sederajat	172
7	Tamat perguruan tinggi /sederajat	103
8	Buta huruf	64
Jumlah		14.794

Sumber : Kantor Camat Teluk Meranti Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah belum sekolah berjumlah 830 orang, tidak tamat sekolah dasar berjumlah 6051, tamat SD/ sederajat berjumlah 5269, Tamat SLTP /sederajat berjumlah 1837, Tamat SLTA / sederajat berjumlah 465, tamat akademi/ sederajat berjumlah 172, Tamat perguruan tinggi /sederajat berjumlah 103, Buta huruf berjumlah 64.

Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga Formal dan informal. Begitu juga halnya di Kecamatan Teluk Meranti terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 5

Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	13
3	SLTP	6
4	SLTA	1
Jumlah		22

Sumber: Kantor Camat Teluk Meranti Tahun 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan dikecamatan Teluk Meranti adalah TK berjumlah 2, SD Berjumlah 13, SLTP berjumlah 6, SLTA berjumlah 1.

2. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di Kecamatan Teluk Meranti menjunjung rasa nasionalisme artinya saling menjaga yang satu dengan yang lain, Penduduk kecamatan Teluk Meranti Mayoritas memeluk agama islam, hal ini dapat dibuktikan melalui tabel yang bersumber dari data kantor kecamatan Teluk Meranti. Sedangkan penganut agama lain relatif rendah dibandingkan dengan penganut agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 6

Komposisi Jumlah Penganut Agama

No	Penganut Agama	Jumlah
1	Islam	14.684 Jiwa
2	Khatolik	15 Jiwa
3	Protestan	95 Jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		14.794

Sumber : Kantor camat teluk meranti tahun 2010

Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat kecamatan Teluk Meranti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 7
Komposisi Jumlah Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	37
2	Musollah	15
3	Gereja	1
Jumlah		53

Sumber: Kantor Kecamatan Teluk Meranti 2010

Dari tabel diatas di ketahui bahwa jumlah sarana ibadah dikecamatan Teluk Meranti adalah Masjid berjumlah 37 buah, Musollah berjumlah 15 buah, Gereja berjumlah 1.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat

Berbicara masalah sosial di kecamatan teluk meranti dari semua lapisan masyarakat baik ia suku melayu, suku minang, suku jawa, suku batak, suku bugis dan suku lainnya, mereka tentram dalam kehidupan bermasyarakat artinya satu sama lain saling membutuhkan dan saling mempengaruhi walaupun tidak mempunyai persamaan sifat, gaya hidup, dan watak, krakter terutama sekali dalam menghadapi masalah-masalah agama.

Adapun perincian mata pencarian masyarakat kecamatan teluk meranti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 8
Komposisi Jenis Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	98 Jiwa
2	TNI/ Polri	20 Jiwa
3	Pensiunan/ Purnawi- rawan	35
	Wiraswasta	
4	Pedagang	704
5	Jasa	47
6	Petani	1817
7	Nelayan	971
8	Peternak	298
9	Karyawan	193
10	Pengangguran	320
Jumlah		4.719

Sumber : Kantor camat teluk meranti tahun 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa jenis mata pencarian penduduk pegawai negeri sipil 98 jiwa, TNI/polri berjumlah 20 jiwa, Pensiunan/ Purnawi- rawan berjumlah 35 jiwa, Pedagang berjumlah 704, jasa berjumlah 47 jiwa, petani 1817 jiwa, nelayan 971 jiwa, peternak berjumlah 298 jiwa, karyawan berjumlah 193 jiwa, pengangguran 320 jiwa dan selebihnya anak-anak serta masyarakat yang tidak terdata.

D. Sosial Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alami maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya².

Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat dikecamatan Teluk Meranti mempunyai bermacam-macam suku dan budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Teluk Meranti hidup dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, jarang terjadi pembenturan dan tidak pernah terjadi anarkis antara sesama suku tersebut. Adapun suku-suku yang terdapat dikecamatan Teluk Meranti adalah sebagai berikut: suku Melayu, suku Batak, suku Jawa dll.

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 194

BAB III

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DALAM EKONOMI ISLAM

A. OPTIMALISASI

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut kamus bahasa Indonesia (Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa) adalah pengoptimalan atau proses menjadikan paling baik.¹

Sedangkan optimalisasi menurut kamus ilmiah populer berasal dari kata optimal yang artinya paling bagus/ Tertinggi; Terbagus; paling menguntungkan.²

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan membuat wajib pajak jadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor perpajakan menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

2. Indikator-indikator Optimal

Adapun yang terkait dalam Indikator-indikator pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya seluruh wajib pajak bumi dan bangunan.

¹ Poewadarminta, *Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1993), h.298.

² M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arokola, 1994), h. 545

2. Terdaftaranya seluruh objek pajak bumi dan bangunan
3. Tercapainya target yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan petugas pemungut sempurna.
5. Memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai Hak dan kewajiban masyarakat.

B. PAJAK DAN MASALAHNYA

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pemungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan³.

Secara umum, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan⁴.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan definisi pajak menurut para ahli diantaranya :

1. Dr.Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukan jenis pemungutan yang diambil oleh pemerintah (Penguasa) dari rakyatnya, baik berupa pemungutan dari

³ Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1, h. 978.

⁴ Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 1.

pemilik atas tanah, pengelolaan tanah, ataupun sumber-sumber lainnya.⁵

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶
3. Prof. Dr. MJH Smeets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁷
4. Prof. Dr. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.⁸

Dari 4 pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Waadillatun*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Jus. V, h. 532.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), Edisi Revisi. h. 1

⁷ Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Selemba Empat, 2008), Edisi 4, h. 6.

⁸ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi Revisi-6- h. 23.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.⁹

Selanjutnya pengertian bumi adalah yang termasuk permukaan bumi dan tanah yang ada dibawahnya. Secara umum bumi adalah sama dengan tanah termasuk tanah pekarangan, sawa, empang, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah/ perairan.¹⁰

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.¹¹

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan(PBB) adalah Pemungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap bumi. Baik permukaannya maupun yang ada dibawahnya dan bangunan yang berupa sesuatu yang dilekatkan secara tetap.

⁹ Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *op cit.*, h. 6-7

¹⁰ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 149

¹¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat Patria, 2004), Buku 2- Edisi Revisi, h. 475.

Selanjutnya diperjelas oleh M.Munawir dalam bukunya perpajakan bahwa syarat-syarat pemungutan pajak tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu:

1. Keadilan, dalam arti bahwa pemungutan itu harus bersifat umum, merata, dan menurut kekuatan.
2. Ekonomis dapat diterima, dalam arti bahwa pemungutan itu tidak akan merusak sumber kemakmuran
3. Dapat mencapai tujuan, dalam arti bahwa pemungutan itu jangan sampai akan mengakibatkan adanya kemungkinan penyelundupan atau pengurangan hasil karena tarifnya tinggi.
4. Berdasarkan undang-undang, dalam arti hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum perlu menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Baik negara-negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak.
5. Harus efisiensi (syarat financial), dalam arti harus pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak yaitu sumber keuangan negara.

Dari beberapa yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang merupakan prinsip-prinsip yang sama yang terkandung dalam definisi-definisi yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra persepsi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment.¹²

2. Undang-undang Tentang Pajak

Dengan langkah reformasi yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1983, hingga kini semua pengenaan dan pemungutan pajak telah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dengan Undang-undang. Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini tentu sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”. Dengan langkah reformasi yang dilakukan pemerintah selama ini, hingga kini terdapat (Sembilan) Undang-undang yang merupakan dasar hukum pengenaan dan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

¹² M. Munawir, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), h. 8-13

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.¹³

¹³ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia* (Jakarta : 2002), h. 9-10

Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah UU No. 12 Tahun 1994.

Pasal 1 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah

objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh badan atau perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
 4. Penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh menteri keuangan.
2. Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

3. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan adalah berupa yang mencakup pengertian bumi seperti permukaan bumi, perairan, lautan dan pengertian bangunan yang berupa gedung, tempat tinggal, taman mewah, jalan tol, kolam renang dan fasilitas

¹⁴ Rimsky K Judisseno, *op cit* ., h. 444

lain yang memberi manfaat.¹⁵ Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, Sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan Nasional, yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan perbukala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.¹⁶

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun yang menjadi subjek PBB menurut ketentuan pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain:

¹⁵ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang, No. 12 Tahun 1994, (Pekanbaru: Pjs. Kepala Kantor Pelayanan PBB, 1995), h. 1

¹⁶ Mardiasmo, *op cit.*, h. 318.

1. Pemilik,
2. Penghuni,
3. Pengontrak,
4. Penggarap,
5. Pemakai dan penyewa.¹⁷

4. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.
2. Keputusan Menteri keuangan No. 201/kmk.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.
5. Keputusan menteri keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tatacara pendaftaran objek pajak Bumi dan Bangunan.

¹⁷ Waluyo, *op cit.*, h. 348-349.

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tatacara penagihan pajak bumi dan bangunan. Dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
7. Keputusan menteri keuangan No. 552/KMK.03/ 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat 1 dan/ Bupati/ Walikota Madya kepala Daerah Tingkat II.¹⁸

5. Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun azaz dan prinsip pemungutan pajak bumi dan bangunan

1. Azaz pengenaan pajak bumi dan bangunan

Untuk membantu kelancaran penerimaan PBB perlu ditetapkan suatu azaz yang dapat menjadi landasan bagi wajib pajak didalam membayar pajak. Adapun yang menjadi azaz dalam pengenaan PBB ini adalah:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda. Misalnya, penyeludupan pajak dan penyalahgunaan oleh petugas pajak.¹⁹

2. Prinsip pengenaan pajak bumi dan bangunan

¹⁸ Achmad T, Triyono, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan jawaban*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Edisi Ke 2 h. 351

¹⁹ Mardiasmo. *Op cit.*, h. 269

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Maka menurut adam smit perlu adanya prinsip pengenaan pajak yang baik. Adapun prinsip yang ia maksud atau lebih dikenal dengan prinsip “Smith’s Conons”.²⁰ Sebagai berikut:

a. Prinsip kesamaan /keadilan (*equity*)

Artinya adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban rill dalam kepuasan yang hilang.

b. Prinsip kepastian (*certainty*)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c. Prinsip kecocokan /kelayakan (*convenience*)

Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan tenanghati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

d. Prinsip ekonomi

²⁰ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, (Puwokarto: BPFE- Yogyakarta, 2001), Cet. Ke-1, h. 97

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia adalah sistem *Self Assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak Repormasi Perpajakan diindonesia tahun 1983. Pemungutan sistem ini juga dianut dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Self Assessmet*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disempurnakan.

- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *With holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Hal ini terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pasal 7, bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan dipakai sistem *Self Assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

Pajak bumi dan bangunan juga merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan untuk daerah dan sebagian lagi untuk pemerintah pusat yang dibagi melalui kas Negara. yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak maka oleh sebab itu keadaan atau status orang, badan yang dijadikan subjek tidak penting/tidak mempengaruhi besarnya pajak.²¹

Mengenai tatacara pembayaran dan penagihan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 adalah pasal 11:

²¹ Rahmat Soemitro, *Panduan Mentri Penyuluhan Perpajakan*, (Jakarta: pusat penyuluhan perpajakan, 1994), h. 2

- a. Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. Pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak
- c. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- d. Dengan administrasi sebagaimana dimaksud ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) oleh wajib pajak.
- e. Pajak yang terhutang dibayarkan dibank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.²²

Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak dijelaskan :

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek.
2. Besar Nilai jual Objek Pajak ditetapkan 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya dengan mendengarkan pertimbangan Gubernur dengan memakai Asas "*Self Assessment*".

²² Liberty Pandiagan, *op.cit*, h. 281-282

3. Besar perhitungan pajak adalah Nilai Jual kedalam pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai jual objek pajak.²³

Secara garis besar prosedur pemungutan PBB berdasarkan Buku panduan ringkasan PBB yang diterbitkan oleh direktorat PBB ada 4 tahap kegiatan PBB yaitu:

1. Tahap Pendaftaran Objek Pajak.

Dalam hal pendataan objek pajak, maka setiap subjek pajak wajib mendaftarkan kekayaan yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan dengan mengisi SPOP yang diterimanya dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani kapada ketua RT/RW.

2. Tahap Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

SPOP Yang telah diisi oleh subjek pajak yang telah dilaporkan ketua RT/RW kepada kelurahan, maka selanjutnya diteruskan ke kelurahan dan selanjutnya akan diberikan ketingkat kecamatan untuk diperiksa dan selanjutnya diteruskan kepada kantor pajak Kotamadya/Kabupaten (dalam hal ini dinas pengelola keuangan dan kekayaan kabupaten Pelalawan) paling lambat 30 hari sejak diterimanya SPOP tersebut kepada wajib pajak.

3. Tahap penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang.

Proses selanjutnya yaitu ketua pajak /Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Pelalawan mengeluarkan SPPT

²³ *ibid*, h.298-299

yang didasarkan kepada data yang ada didalam SPOP dan diberikan kepada wajib pajak melalui pemerintahan pajak bumi dan bangunan.

4. Tahap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pembayaran PBB saat ini tidak lagi dilakukan secara penagihan oleh petugas pemungut kepada wajib pajak pada setiap daerah, tetapi menggunakan SISTEP (sistem tempat pembayaran) dimana setiap wajib pajak dapat membayar PBB kepada tempat yang telah ditunjuk pemerintah antara lain Bank Pemerintah, Kantor Pos dan Giro, dan lain-lain kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa membayar langsung karena jauh dari lokasi pembayaran, maka diadakan petugas pemungut PBB yang ditunjuk.²⁴

7. Sanksi Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan sebagai berikut:

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah didengar secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagi dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung

²⁴ Tim penyusun Direktorat Jendral pajak dan yayasan bina pembangunan, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Bina Arena Parwira, 1992), Cet. Ke-3

berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak adalah selisi pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisi pajak yang terhutang.

3. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal :
 - a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak.
 - b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.
5. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:
 - a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jenderal pajak.
 - b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

- c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
- e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan:

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

Untuk sebab kesengajaan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) pajak yang terutang.

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

Adapun sanksi bagi pejabat yang melanggar peraturan yaitu:

a. Sanksi umum

Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan dimuka dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu antara lain:

Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris.

b. Sanksi khusus

Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya, yang :

- 1) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan.
- 2) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2000.000.00 (dua juta rupiah).²⁵

C. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari

²⁵ Mardiasmo, *Op. cit.*, h. 337-339

individu-individu sosial semata namun juga manusia yang memiliki bakat religi.²⁶

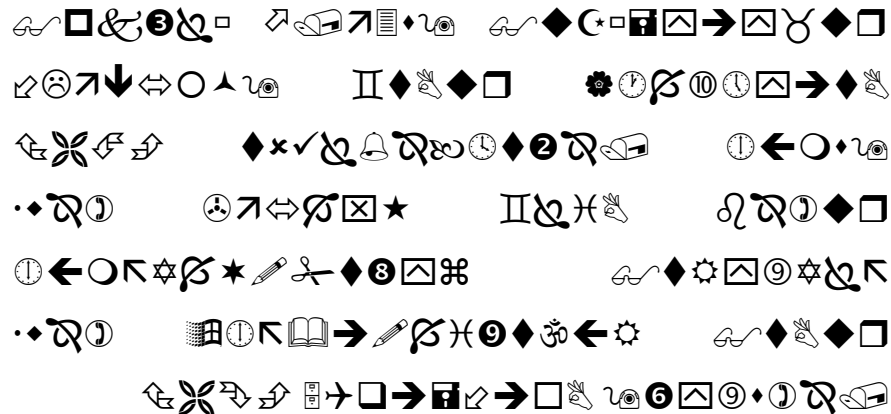
Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/ harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan yang bhatil; tidak berlebihan/ melampaui batas; tidak dizalimi dan menzalimi; menjauhkan diri dari unsur-unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *gharar* (ketidak jelasan dan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Islam juga mendorong umatnya/ pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan dari Allah SWT bahwa ia menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis²⁷.

Ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia sedangkan agama merupakan seperangkat aturan yang diturunkan untuk membimbing atau mengatur perilaku manusia. Itu artinya bahwa bidang-bidang pembahasan dalam ekonomi merupakan bagian dari aturan-aturan agama.

Islam sendiri dalam ajaran-ajarannya banyak sekali mengandung ajaran tentang ekonomi. Kita dapat menemukan dalam beberapa ayat Al-qur'an dan sunnah tentang ekonomi seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Hijr 20-21 :

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-1, h. 1

²⁷ Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 11-12



Artinya : *Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya[795]; dan kami tidak menurunkan[796]nya melainkan dengan ukuran yang tertentu.*²⁸

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan eksport tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir kepada tuhan.²⁹

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong mempelajari karakteristik ekonomi Islam, diantaranya:

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis

²⁸ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 209-210

²⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) , h. 31

(member penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.

- b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- c. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan konvensional.³⁰

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).³¹

Dalam hukum syara' dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi terdiri atas tiga asas (fundamental) yaitu : bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (*tamalluk*), hak milik, serta distribusi kekayaan ditengah masyarakat.³²

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Ed. 1 Cet. Ke-2, h. 18.

³¹ *Ibid.*

³² Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), , Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h.32.

Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan bersama pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan. Dalam prinsip ekonomi Islam harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nanti akan melahirkan kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi mengajarkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam nuansa hubungannya dengan Tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa dibelakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, maksimasi kepuasan dan keuntungan, ada suatu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, kapasitas untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-qur'an. Dengan pola fikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama atau *equality and cooperation*. Konsekuensi langsung dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan dibumi hanyalah milik Allah SWT,

dan bahwa dia telah menjadikannya itu semua untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikan secara adil sumber daya-Nya di bumi.³³

b. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa seseorang harus profesional dengan jumlah dan kategori pekerjaan yang dikerjakannya. Harus ada penghitungan misalnya “jam orang kerja” atau *man-hours of work* dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.³⁴

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Ini menegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan perorangan. Unsur utama dari pendapatan nasional dan transfer kekayaan yang digunakan untuk tujuan redistribusi adalah sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, *ghaimimah*, *fai*, *kharaj* dan *'ushr*. Pada tingkat yang lebih makro, hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan perorangan serta harus berlangsung secara fundamental atas dasar

³³ Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta :Granada Press, 2007), h. 21.

³⁴ *Ibid*, h. 21.

ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional kesempatan kerja atau *employment* dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.³⁵

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, brhemat dan menjahui pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁶

³⁵ *Ibid*, h. 22.

³⁶ AM. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta : CV. Raja wali Press, 1987), h. 66

BAB IV

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI

KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN

DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti

Dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan belanja daerah.

Mengingat bahwa pajak merupakan sumber yang penting bagi pembelanjaan pembangunan, maka diperlukan usaha-usaha untuk melakukan Intensifikasi pemungutan. Keberhasilan pemungutan ditentukan oleh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawaan mengambil upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti. Dimana pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk

Meranti belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawa ini:

Tabel IV.9
Laporan Penerimaan PBB
Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2009/2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	Rp.25.038.964	Rp. 8.071.872
2010	Rp.25.496.660	Rp. 8.824.801

Sumber: Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan PBB di Kecamatan Teluk Meranti yang terealisasi tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Adapun upaya-upaya yang dimaksud agar petugas pemungut mampu melaksanakan tugasnya dilapangan dengan sebaik-baiknya adalah sebagai berikut:

1. Petugas Pemungut/ kolektor Kecamatan Teluk Meranti

Diharapkan nanti memahami dan mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dilapangan dengan seefesien mungkin. pemahaman yang baik akan menghasilkan kerja yang baik pula dan penerimaan akan bisa meningkatkan pula. Dalam kegiatan orientasi kepada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan sangat perlu dilakukan guna untuk memantapkan penerimaan PBB.

a. Minotoring Kelapangan dalam Hal Penerimaan

Suatu kerja tidak akan berjalan efisien apabila tidak pernah diadakannya suatu pantauan apakah kegiatan itu sudah berhasil atau belum. Adanya usaha untuk melihat kendala-kendala apa yang ada dilapangan, adanya pengevaluasian dan pengarahan dan adanya keikutsertaan KP. PBB adalah merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam hal melakukan pemantauan atau minotoring yang diadakan oleh dinas pengelola keuangan dan kekayaan Kabupaten Pelalawan sebab hal ini dirasakan kurang berhasil apabila salah satu kegiatan ini tidak dilaksanakan. Sebab tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai pengoptimalan penerimaan. Kegiatan ini sekaligus melakukan pembinaan kepada petugas secara langsung bagaimana memecakan kendala-kendala yang ada untuk kemudian turun memungut¹.

b. Bulan Bakti dan Penyuluhan

Bulan bakti merupakan suatu kegiatan besar sekaligus mengadakan penyuluhan yang tujuannya untuk merangsang masyarakat agar membayar pajak pada kegiatan ini pula diumumkan pemenang yang dianggap memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang kesadarannya tinggi. Penyuluhan ini dilakukan agar masyarakat benar-benar sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. upaya penyuluhan ini memang merupakan salah satu cara yang tepat untuk menarik keinginan dan perhatian masyarakat agar lebih mengerti dan

¹ Kasprul Adri, *Wawancara*, (bagian perimbangan DPKKD), di pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 20 September 2011

percaya akan kegunaan dan pentingnya pembayaran PBB. penyuluhan ini dilakukan oleh camat bersama-sama dengan dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten pelalawan kepada masyarakat. Berhasilnya suatu penyuluhan ini ditentukan oleh respon dan antusias masyarakat baik itu kehadiran masyarakat, keaktifan masyarakat bertanya, ketepatan waktu pelaksanaan².

c. Membangun kerja sama yang baik dengan pihak yang terkait

Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik antara sesama pihak yang terkait. Oleh karena itu dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten pelalawan juga menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak-pihak yang terkait, dalam kelancaran penghimpunan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Seperti dengan kolektor pedesaan, camat dan kepala desa.

Secara umum bentuk kerja sama yang dilakukan kepala desa atau camat dalam membantu atau meningkatkan pembayaran PBB adalah selain pemberian SPPT secepat mungkin oleh kepala desa ke wajib pajak, dan juga menetapkan kebijakan dalam bentuk penegasan/ syarat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dalam mendapatkan KTP dan kenaikan pangkat oleh camat setempat.

Upaya ini memberikan peluang yang banyak terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Pelalawan karena pada umumnya masyarakat akan memerlukan KTP.

² Hendro Wahyudi, *Wawancara*, (Pemungut PBB), di Kecamatan Teluk Meranti , 20 September 2011

Kebijakan ini dilakukan oleh camat, karena selama ini tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan pembayaran pajak tersebut. Dan akhirnya semenjak diadakan kebijakan yang demikian menyebabkan penerimaan PBB dapat lebih meningkat³.

- d. Memberikan surat teguran bagi wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPPT (Surat Teguran Pajak Terhutang).

Surat Teguran Pajak Terhutang disampaikan oleh kantor pelayanan PBB melalui kepala desa kepada wajib pajak, hendaknya dikembalikan enam bulan saat jatuh tempo, SPPT belum juga diserahkan, maka pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan akan memberikan surat teguran pertama. Surat teguran tersebut berupa peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat tersebut.

2. Masyarakat Wajib Pajak

- a. Kesadaran Masyarakat

Seseorang mempunyai kesadaran apabila sikap sesuai dengan objek pajak yang mempengaruhinya. Dengan kata lain seseorang wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak apabila penilaian atas kesadarannya untuk bertindak sesuai dengan objek yang mempengaruhinya yakni keharusan untuk membayar pajak. Dalam

³ T. Ida fitri, *Wawancara*, (bagian perimbangan DPKKD), di Pangkalan Kerinci, 22 September 2011

pelaksanaan pembayaran atau penyetoran PBB, sangat ditentukan adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak sehingga dengan tingginya kesadaran wajib pajak akan membuat lancarnya penerimaan PBB.

Untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran responden dalam membayar PBB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.10
Jawaban Responden Tentang Tingkat
Kesadaran dalam Membayar PBB di Kecamatan Teluk Meranti

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Kewajiban	16	31,37
2	Ikut-ikutan	12	23,53
3	Terpaksa	23	45,09
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam membayar PBB di Kecamatan Teluk Meranti responden cenderung membayar dengan terpaksa atau rendah yakni sebanyak 23 responden atau (45,09%), dan pembayaran dengan ikut-ikutan atau sedang yakni sebanyak 12 responden atau (23,53%), sedangkan yang membayar dengan kesadaran sendiri atau tinggi yakni sebanyak 16 responden atau (31,37%).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tentang penunggakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.11
Jawaban responden tentang penunggakan
dalam pembayaran PBB di Kecamatan Teluk Meranti

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	23	45,09
2	Jarang	10	19,60
3	Tidak pernah	18	35,29
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sering menunggak yaitu sebanyak 23 orang atau (45,09%), dan yang jarang menunggak sebanyak 10 orang atau (19,60%) dan yang tidak pernah menunggak sebanyak 18 orang atau (35,29%).

2. Tingkat Disiplin Membayar PBB

Bagi responden yang tidak pernah menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, ini berarti responden atau wajib pajak mempunyai disiplin yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun.

Namun demikian perlu diketahui tingkat disiplin tersebut berdasarkan kapan mereka membayar pajak bumi dan bangunan setelah menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

Ada tiga kategori waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu membayar pada waktu yang lebih awal setelah

menerima SPPT, membayar pada pertengahan tahun setelah menerima SPPT dan membayar pada akhir tahun atau hampir jatuh tempo setelah menerima SPPT.

Untuk melihat tingkat disiplin responden dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.12
Jawaban responden tentang tingkat
disiplin membayar PBBdi Kecamatan Teluk Meranti

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	<1 bulan setelah menerima SPPT	14	27,45
2	1-6 bulan setelah menerima SPPT	25	49,02
3	>6 setelah menerima SPPT	12	23,53
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan, tahun 2011

Jika dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 14 orang atau 27,45% dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin tinggi yaitu kurang dari satu bulan setelah menerima SPPT terdapat 25 orang atau 49,02% dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin sedang yaitu membayar pada satu sampai enam bulan setelah menerima SPPT kemudian terakhir terdapat 12 orang atau 23,53% dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin rendah yaitu

membayar pada waktu enam (6) sampai akhir tahun jatuh tempo pembayaran setelah menerima SPPT.

Untuk mengetahui tingkat keberatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.13
Jawaban Responden Tentang Tingkat Keberatan dalam
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk
Meranti

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Keberatan	28	54,90
2	Tidak Keberatan	23	45,09
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa responden yang keberatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu sejumlah 28 orang atau (54,90%), dan yang tidak keberatan dalam membayar sejumlah 23 orang atau (45,09%).

Dan untuk mengetahui pembayar pajak bumi dan bangunan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.14
Jawaban responden tentang
pembayaran pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya.

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	17	33,33
2	Jarang	15	29,41
3	Tidak Pernah	19	37,25
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembayaran PBB untuk tiap tahunnya yang sering membayar 17 orang atau (33,33%), dan jarang membayar sebanyak 15 orang atau (29,41%), sedangkan 19 orang atau (37,25%).

3. Penyerahan STTS oleh Petugas Pemungut PBB Kepada Wajib Pajak

Untuk melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan aparat petugas pemungut, maka aparat akan menyerahkan STTS sebagai bukti pembayaran yang penyerahan STTS itu diserahkan paling lambat selama enam hari.

Untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penyerahan STTS itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.15
Jawaban responden tentang tingkat
Pelayanan Penyerahan STTS di Kecamatan Teluk Meranti

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	25	49,02
2	Sedang	17	33,33

3	Kurang baik	9	17,64
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2011

Berdasarkan tanggapan masyarakat diatas diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa penyerahan STTS oleh petugas dilakukan sebelum waktu tempo enam hari. Ini menandakan juga bahwa petugas aktif atau disiplin dengan tugasnya yakni sebanyak 25 Responden atau 49,02%, 17 responden atau 33,33% yang menyatakan penyerahan STTS dilakukan pada waktu jatuh tempo yakni 6 hari. Sedangkan 9 responden atau 17,64% yang menyatakan bahwa petugas pemungut menyerhkan STTS lewat dari enam hari bahkan sampai berminggu-minggu.

Untuk mengetahui bagaimana sifat para pemungut pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.16

**Jawaban responden tentang sifat para pemungut
pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti**

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Sopan	42	82,35
2	Kurang sopan	9	17,64
3	Tidak sopan	0	0
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas tentang sifat para pemungut pajak bumi dan bangunan responden cenderung menjawab sopan yaitu sebanyak 42 orang.

4. Manfaat yang di Rasakan oleh Masyarakat

Pajak merupakan iuran wajib dari wajib pajak kepada Negara. sedangkan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Di samping itu juga pajak merupakan manifestasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum lainnya.

Untuk melihat bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dari pembayaran PBB itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.17

**Jawaban responden tentang manfaat
PBB bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti**

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Bermanfaat	21	41,17
2	Cukup bermanfaat	7	13,72
3	Tidak bermanfaat	23	45,09
Jumlah		51	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan, tahun 2011

Dari tabel diatas terdapat 21 orang atau 41,17% dari responden mengatakan PBB bermanfaat bagi masyarakat dan 7 atau 13,72% dari responden mengatakan PBB cukup bermanfaat kemudian terakhir

terdapat 23 atau 45,09% dari responden mengatakan PBB tersebut tidak bermanfaat, mereka menilai fasilitas umum yang ada saat ini dirasakan masih kurang.

B. Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan terdapat beberapa faktor untuk mengoptimalkan pemungutan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi

Berdasarkan undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang tata cara perpajakan, telah dijelaskan bahwa sanksi bagi wajib pajak karena kealpaan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Dikenakan sanksi enam bulan penjara atau setinggi-tingginya dua kali pajak terhutang. Sedangkan karena disengaja sehingga merugikan negara, dipidana selamamanya dua tahun penjara dan setinggi-tingginya lima kali pajak terhutang⁴.

Ternyata sanksi ini hanya berlaku pada segolongan wajib pajak saja. Artinya sanksi ini berlaku apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal, dan berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka barulah sanksi ini berjalan. Dan sebaliknya, selama kepentingan seorang tersebut tidak menyangkut dengan pembayaran PBB, maka sanksi ini terabaikan begitu saja.

Faktor ini jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pemungutan pajak. Karena undang-undang merupakan

⁴ Achmad T, Triyono W, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan Jawaban Edisi Kedua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h.362

payung hukum bagi terselenggaranya pemungutan PBB. Dengan undang-undang dan sanksi yang benar-benar ditegakan, atau dapat ditindak lanjuti terhadap yang enggan membayar pajak, maka wajib pajak akan merasa terikat dengan suatu kewajiban berdasarkan hukum tersebut. Untuk itu undang-undang dan sanksi harus memiliki ketegasan dari pemerintah⁵.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB.

Kesadaran berarti ingat, atau menyadari bahwa pajak itu penting bagi pembangunan daerah. Dan oleh karena itu masyarakat hendaknya dapat menyadari bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan juga merupakan kewajiban kenegaraan, yang berkaitan dengan pembangunan, ekonomi, sosial dan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan pembangunan daerah itu sendiri, apabila pendapatan suatu daerah itu optimal, maka pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat akan mudah terwujud. Faktor ini akan tetap ada selama tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mengikat terhadap PBB. Untuk itu harus adanya kepatuhan yang bersumber dari ketegasan hukum dan tingkat kesadaran yang tinggi.

3. Kurangnya dana yang tersedia.

Dengan melakukan pendataan jumlah wajib pajak dapat diketahui, dan juga pengambilan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) oleh wajib pajak. Pendataan terhadap wajib pajak merupakan jalan yang baik untuk

⁵ Basir G. *Wawancara*, (pemungut PBB), di Kecamatan Teluk Meranti, 14 Oktober 2011

menentukan jumlah, keadaan, dan tingkat ekonomi seorang wajib pajak. Karena tugas pendataan pajak dapat melihat langsung wajib pajak. Apalagi jika pendataan ini dilakukan dengan benar.

Sementara jika penghitungan wajib pajak berdasarkan pengembalian SPOP, sulit diterima dengan jumlah wajib pajak sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, seperti tingkat ekonomi dan kepentingan masyarakat yang barang kali masih rendah.

Pendataan terhadap wajib pajak memerlukan banyak persiapan. Selain persiapan mental, waktu, dan tenaga. Dan juga merupakan persiapan paling utama yang perlu dianggarkan pemerintah. Karena pelaksanaan pendataan memerlukan dana yang besar sementara dana yang tersedia masih sangat kurang.

4. Masih banyaknya wajib pajak yang tingkat pendidikan nya relatif rendah.

Tingkat pendidikan juga menentukan tingkat kelancaran pemungutan pajak. Biasanya seorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah mengerti apa tujuan, kegunaan pemungutan pajak tersebut dan jika mereka selaku wajib pajak yang baik, maka mereka akan melakukan pembayaran PBB sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, namun tingkat pendidikan di Kecamatan Teluk Meranti terhitung masih rendah. Masih adanya masyarakat yang tidak mengerti sama sekali apa itu Pajak Bumi dan Bangunan serta kegunaannya. Ini terjadi seperti yang penulis lihat bahwa memang tingkat pendidikannya

masih rendah, ditambah lagi tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih kurang.⁶

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dimasa pemerintahan khalifa umar bin khatab, inilah pembaharuan dalam administrasi dan pemerintahan mulai dikembangkan, termasuk dibidang perpajakan mendapat perhatian dari amirul mukminin.⁷

Di samping zakat perekonomian Islam memiliki beberapa variable seumpama zakat yang lebih bebas penggunaannya, seperti infaq, shadaqah, hibah, wakaf, kharaj, jizyah, ushr dan ghanimah. Variabel-variabel ini juga merupakan masukan Negara bagi program-program pembangunan.

Dalam variable tersebut kuantitasnya ada yang bersifat sukarela seperti infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. Yang bersifat wajib adalah zakat, kharaj, jizyah dan ushr. Sedangkan ghanimah merupakan sebuah hasil yang bergantung pada kemenangan dari sebuah peperangan yang dilakukan oleh Negara.

Adapun yang merupakan masukan Negara bagi program-program pembangunan yang bersifat wajib adalah sebagai berikut:

1. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah produktif yang dimiliki rakyat bahkan pada kasus tertentu Negara memiliki hak untuk menyita tanah yang berpotensi namun ditelantarkan

⁶ Eprizal, *Wawancara*, (bagian pendapatan DPKKD), di Pangkalan Kerinci, 27 September 2011

⁷ Helmi Karim, *Pajak dalam Islam dan Kemungkinan Pengembangannya sebagai sumber Keuangan Negara*, (ORASI ILMIAH Pada Dinas Talis XXV IAIN Susqa, 1995), h. 7

oleh pemiliknya atas dasar alasan kemashlahatan. Besarnya pajak jenis ini menjadi hak Negara dalam menentukannya. Dan Negara sebaiknya menentukan besarnya pajak ini berdasarkan kondisi perekonomian yang ada. Dengan karakteristiknya seperti ini, kharaj dapat menjadi instrument fiskal yang dapat diandalkan oleh Negara untuk mendukung program-program pembangunan Negara.

Hasanuzzaman mengungkapkan bahwa pajak tanah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak Ushr dan pajak kharaj. Pajak ushr dikenakan pada tanah di jazirah arab, baik yang diperoleh secara turun temurun maupun dengan penahlukan. Sedangkan pajak kharaj dikenakan pada tanah diluar jazirah arab. Abu Yusuf bahwa setiap tanah yang pemiliknya masuk Islam adalah tanah Ushr, dan di luar itu, seperti tanah orang-orang asing yang telah didamaikan penduduknya dan menjadi tanggungan umat Islam, maka tanah itu adalah kharaj.

Dilihat dari jenis kontribusi tanah pada Negara, Abu Ubayd mengklasifikasikan tanah menjadi tiga jenis. Pertama tanah yang pemiliknya masuk Islam, yaitu tanah Ushr. Kedua tanah yang dikuasai dengan perdamaian atau kesepakatan dengan pajak (kharaj) yang telah ditentukan, yaitu tanah kharaj. Ketiga tanah yang diambil dengan paksa, yaitu yang direbut oleh kaum muslimin.

Hasanuzzaman juga menunjukan bagaimana Islam melihat kepemilikan tanah beserta hak pengelolaannya merupakan faktor penting dalam ekonomi. Menjadi kesepakatan ekonomi bahwa tanah merupakan

faktor produksi yang paling produktif, sehingga kepemilikan dan pengelolaannya menjadi perhatian penting dalam ekonomi. Dan Islam memberikan perhatian yang cukup pada kepemilikan dan pengelolaan tanah ini.

Menurut Quuthb Ibrahim Muhammad mengungkapkan bahwa Negara juga dapat mengelola tanah yang diberikan hak penjagaan dan perlindungannya oleh rakyat. Tanah petakan di bawah perlindungan Negara ini dikenal dengan Al Hima.

Penggunaannya tentu saja untuk kepentingan Negara atau publik, seperti program pertahanan keamanan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.

Dalam konteks perekonomian modern, kharaj juga menjadi sebuah instrument yang penting dalam penerimaan modal pembangunan. Inovasi kebijakan fiskal menggunakan kharaj sebagai rujukan merupakan sebuah keharusan dalam perekonomian modern saat ini misalnya bagaimana menyikapi orang-orang yang tidak memiliki tanah produktif tapi mempunyai pendapat yang begitu besar, mungkin akan lebih maslhalat jika inovasi kebijakan pajak menganalogikan penarikan pajak menggunakan pendekatan kharaj ini, ketimbang menganalogikan pada zakat karena karakteristik pendistribusian kharaj lebih bebas dari pada pendistribusian zakat yang terkait pada golongan tertentu.

Namun tentu saja haruslah disepakati interprestasi dalil-dalil syariat yang mengatur tentang kharaj ini serta aplikasinya

dipereconomian modern. Sehingga implementasi instrument ini bagi Negara akan maksimal dan tepat sasaran.

2. Jizyah

Jizyah (poll tax) merupakan pajak yang hanya diperuntukan bagi Negara bukan muslim yang mampu. Berdasarkan banyak literatur klasik ekonomi Islam pajak jenis ini dikenakan pada warga Negara non muslim laki-laki. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang uzur, cacat dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu Negara harus memenuhi kebutuhan penduduk bukan muslim tersebut akibat ketidak mampuan mereka memenuhi kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari Negara yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya pada penduduk muslim saja.

3. Ushur

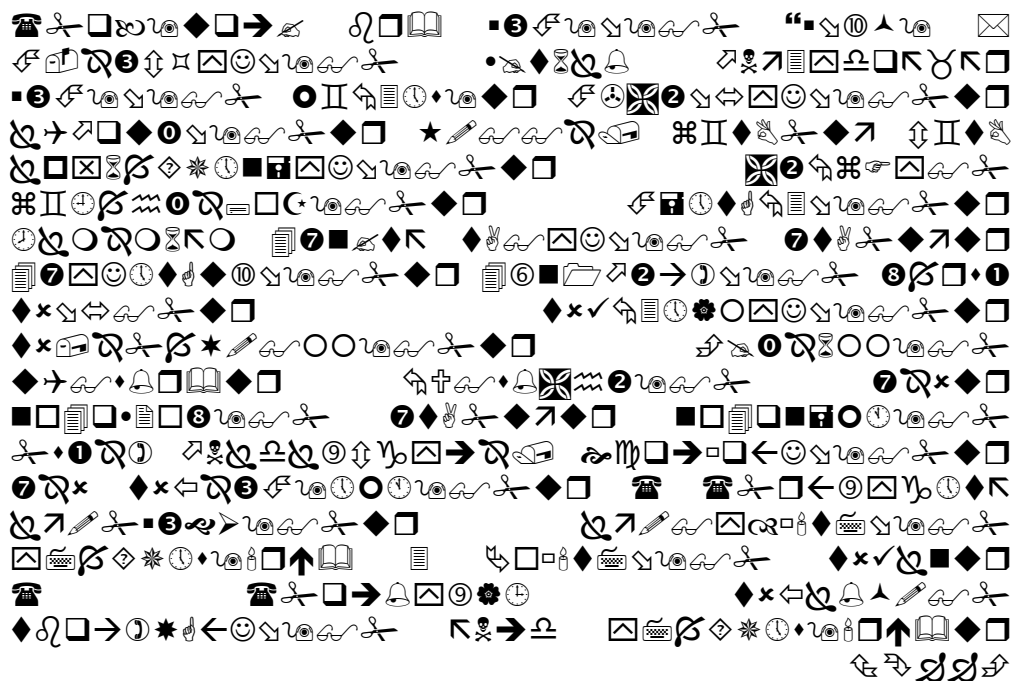
Ushur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara Islam. Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada Negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Dan jika dikenakan besarnya juga harus sama dengan tarif yang diberlakukan Negara lain tersebut atas barang Negara Islam. Jadi ada perbedaan disini antara ushr sendiri lebih tepat definisinya apa telah dijelaskan pada bahasa kharaj di atas.

Menurut hasanuzzaman Ushur (bentuk jamak dari ushr) berasal dari ungkapan pajak sepuluh persen dari nilai barang (ada yang mengungkapkan satu dirham pertransaksi yang terjadi) yang dikenakan atas pedagang pada masa sebelum Islam, dan petugas ushur ini dikenal dengan sebutan ashir. Meskipun pada masa Umar bin Khattab praktek ini dilakukan kembali, namun asas dan bentuknya tidak sama dengan praktek ashir sebelum masa sebelum Islam. Masih menurut hasanuzzaman, Abu Ubayd mengungkapkan bahwa praktek ashir diganti oleh Rasulullah dengan zakat, sehingga ushur pada hakikatnya dikenakan hanya pada kaum pedagang kafir Harbi; kaum kafir yang menentang dan memerangi Islam dan Dzimmi; kaum kafir yang tidak memusuhi dan memerangi Islam. Besarnya Ushur yang dikenakan adalah sepuluh persen bagi pedagang harbi, lima persen bagi pedagang dzimmi dan dua setengah persen bagi pedagang muslim (zakat).⁸

Pengumpulan pajak dan zakat memiliki peranan penting bagi kehidupan ekonomi, ibadah, dan kesejahteraan suatu masyarakat. Oleh karena itu negara mulai mewajibkan mulai periode Islam terdahulu, hingga sekarang selain zakat yang diwajibkan bagi umat muslim. Dan juga pajak wajib dipungut atas tiap-tiap warga negara tanpa membedakan agama yang dianut. Keduanya itu apabila dikaitkan dengan undang-undang pengelolaan zakat. Yaitu Undang-undang No. 38 tahun 1999 pasal 5. Bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata

⁸ Akhmad Mujahidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: 2009), Cet. Ke-1, h. 66-

keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial⁹. Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Salah satu alasan keseharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak ditetapkan negara, disamping menunaikan kewajiban zakat, adalah surah al-Baqarah ayat 177.



Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada

⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Cet. Ke-1, h.

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”¹⁰

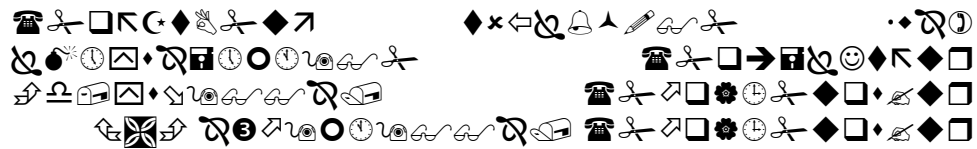
Dalam kalimat dan memberikan harta yang dicintainya menurut para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin walaupun sudah menunaikan zakat memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.¹¹

Sebelum memaparkan tentang bagaimana optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti menurut tinjauan ekonomi Islam, tentang tidak terealisasinya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak di Kantor Dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, maka baiknya terlebih dahulu perlu diperhatikan, bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Pengelola keuangan, dalam mengatasi keterlambatan. Jika wajib pajak tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak Dinas pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Pelalawan berhak mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak, hal ini dilakukan karena untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 21

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 62

dapat dibenarkan agama Islam sebagaimana dijelaskan pada surah Al-‘ashr ayat 3.



Artinya : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling nasehat menasehati. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan penyampaian surat teguran oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan kepada wajib pajak untuk diingatkan atas kewajibannya kepada Negara.

Seperti yang telah disinggung diatas, Bahwa pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak mengadakan penyuluhan. Penyuluhan apabila dianalogikan kepada dakwa, maka penyuluhan itu sama dengan dakwa yaitu menyampaikan. Dalam hal ini penyuluhan ditujukan untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai PBB. Dalam Islam dianjurkan agar kita berdakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125.



¹² *Op cit*, h. 482



Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845]

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹³

Dalam pengumpulan pajak mengadakan kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait. Kerjasama juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah ta'awun (tolong menolong). Keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, tidak akan terlepas dari adanya kerjasama yang baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2.



Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa konsep masyarakat menurut Islam adalah suatu masyarakat yang saling tolong menolong dalam semua perbuatan, baik bersifat ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pertahanan. Konsep tolong menolong

¹³ *Ibid*, h. 224

¹⁴ *Ibid*, h. 85

adalah berlandaskan prinsip kemanusiaan. tolong-menolong menunjukan bahwa manusia dijadikan sebagai makhluk sosial karena manusia ditakdirkan Allah menjadi khalifah-Nya dimuka bumi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai dengan ekonomi Islam, dalam hal ini dinas pengelola keuangan dan kekayaan kabupaten pelalawan memungut pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, demi kesejahteraan rakyat. Tapi pada kenyataannya pemungutan pajak yang terealisasi tidak sesuai dengan yang ditargetkan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka pembangunan tidak terlaksana. sebagaimana telah dijelaskan diatas pajak itu wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin dinegara Indonesia yang memenuhi kretarteria sebagai wajib pajak, pada kenyataannya dilapangan kebanyakan wajib pajak tidak mau untuk membayar pajak, karena mereka merasa bahwa hasil dari pemungutan pajak tidak disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut dilarang dalam ekonomi Islam Seharusnya uang pajak harus digunakan untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Karena uang pajak adalah hasil keringat rakyat, yang harus digunakan secara efektif dan hemat. Ia bukanlah milik raja atau presiden atau siapapun yang memerintah. Ia adalah milik Allah Swt. Yang harus dipergunakan sesuai dengan kaidah umum yang berlaku dalam tata cara pengeluaran uang Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1994 telah dijelaskan bahwa hasil dari pada penerimaan pajak bumi dan bangunan diserahkan sebagian besar untuk daerah sendiri. Untuk itu daerah juga harus membantu pelaksanaan penerimaan PBB tersebut.

1. Adapun dalam mengoptimalkan pemungutan PBB di Kecamatan Teluk Meranti pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengambil langkah-langkah agar pemungutan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu melakukan kegiatan Orientasi kepada pemungut, Minotoring kelapangan dalam hal penerimaan, Bulan bakti serta penyuluhan, dan membangun kerjasama dengan pihak terkait.
2. Realisasi penerimaan PBB selama ini belum mencapai target yang diinginkan disebabkan karena pemungutan belum dilaksanakan seoptimal mungkin. Tidak adanya keseriusan dari aparat petugas dilapangan atau administrasi yang lambat dan juga masyarakat yang sulit untuk disadarkan merupakan masalah yang sangat dirasakan sekali dalam prakteknya melakukan pemungutan.
3. Ditinjau menurut ekonomi Islam optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam hal ini karena penyaluran dana untuk pembangunan tidak terlaksana secara optimal jadi

tidak adanya keseimbangan antara pembayaran pajak dengan pembangunan..

B. Saran

Melihat gejala-gejala yang ada dalam masyarakat yakni rendahnya kesadaran dalam membayar PBB, penyuluhan-penyuluhan perlu terus dilakukan agar nantinya tercipta masyarakat yang sadar akan kewajibannya.

1. Kepada Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Pelalawan agar bisa menyampaikan kepada Dirjen Pajak dalam hal ini melalui KP. PBB supaya biaya pemungutan Di Kecamatan Teluk Meranti perlu ditinjau ulang lagi sebab ditemuinya dilapangan bahwa biaya operasional lebih besar dari hasil yang di terima.
2. Perlu ditingkatkan penggunaan PBB untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat dengan mencantumkan papan nama proyek yang bersumber dari dana PBB.
3. Kontor Dinas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan agar segera menyampaikan SPPT kepada wajib pajak sesegera mungkin agar wajib pajak bisa membayar tepat pada waktunya.
4. Diharapkan kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktunya.
5. Diharapkan agar hokum yang telah dibuat dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Waadillatun*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Jus. V.
- Amachi Zandjani, Tubagus Chairil, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992).
- AM. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta : CV. Raja wali Press, 1987).
- Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi Revisi-6.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemah*, (Semarang, CV. As-syifa, 1999).
- hafidhuiddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Insani: 2002). Cet, Ke. 1.
- <http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:3UIZiuuJBK0q7M>:<http://www.granitegrok.com/>
- Ilyas Richard Burton, Wirawan B, *Hukum Pajak* , (Jakarta : Selemba Empat, 2008), Edisi 4.
- Judisseno, Rimsky K, *Perpajakan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003).
- _____, *Perpajakan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), Edisi Revisi.
- Markus, Muda, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. Ke-1.
- M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arokola, 1994).
- Mujahidin, Akhmad , *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-1.

M. Munawir, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994).

M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, (Puwokarto: BPFE- Yogyakarta, 2001), Cet. Ke-1.

Natadiwirja, Muhandis, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta :Granada Press, 2007).

Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia* (Jakarta : 2002).

Poewadarminta, *Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1993).

putyamoko, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, (yogyakarta: 2002).

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997).

Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), ,Ed. Ke-1, Cet. Ke-1.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Soemitro, Rahmat, *Panduan Mentri Penyuluhan Perpajakan*, (Jakarta: pusat penyuluhan perpajakan, 1994).

T. Achmad, Triyono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

_____, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan jawaban*, (Jakarta: PT. Ra ja Grafindo Persada, 2005), Edisi Ke 2.

Tim penyusun Direktorat Jendral pajak dan yayasan bina pembangunan, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Bina Arena Parwira, 1992), Cet. Ke-3.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat Patria, 2004), Buku 2-Edisi Revisi.